

STRATEGI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BATU (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)

Nelly Nurul Izza¹, Afifuddin², Suyeno³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail : nellynurul2727@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya penerima bantuan PKH atau baidas yang disebut dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Melihat kondisi masyarakat miskin itu maka, sangat diperlukannya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin kemudian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan Program Keluarga Harapan di tahun 2006 dan bekerjasama dengan Bank Dunia. Terlepas dari masalah itu penerima bantuan PKH di Kota Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menurut koordinator PKH Kota Batu yang ia miliki berjumlah 2176 penerima. Seperti yang diketahui jumlah penerima semakin bertambah tetapi hasil masih menjadi tanda tanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, kuisioner, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya strategi Dinas Sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu memiliki nilai yang signifikan yakni dalam kategori baik yakni dengan skor 9986. Akan tetapi nilai signifikan sebesar 9986 tersebut juga masih memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Meskipun tanggapan responden secara umum meyakini bahwasannya pelaksanaannya menyatakan sudah cukup bagus namun masih terdapat beberapa masalah yang cukup krusial yakni terkait dengan lambatnya proses pencairan bantuan uang tunai, sosialisasi yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, pemberdayaan bantuan program kewirausahaan yang kurang dioptimalkan, serta masyarakat yang juga masih menggunakan bantuan uang tunai mereka untuk kebutuhan pokok mereka bukan untuk pembukaan lapangan usaha yang bisa mereka kelola secara mandiri.

Kata Kunci: Strategi, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan

Pendahuluan

Masalah kemiskinan di negara berkembang memang menjadi permasalahan yang genting untuk dapat ditanggulangi. Masalah kemiskinan menjadi faktor yang rumit dan penting untuk menjadikan sebuah negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan agar angka kemiskinan bisa ditekan dan terus dikurangi. Hal ini adalah permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Dibanyak negara berkembang dunia termasuk Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan memang menjadi sebuah cita-cita yang sulit di wujudkan bagi setiap pemimpin negara.

Upaya-upaya secara konteks di Indonesia ditujukan untuk mengurangi kemiskinan yang terus diluncurkan oleh pihak Pemerintah dengan berbagai model bantuan maupun program-program penanggulangan kemiskinan yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Melihat kondisi masyarakat miskin itu maka, sangat diperlukannya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin kemudian Badan

Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan Program Keluarga Harapan di tahun 2006 dan bekerjasama dengan Bank Dunia. Untuk pertama kalinya, pada bulan Agustus 2007 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bone Balango Provinsi Gorontalo.

Peluncuran tersebut menjadi langkah awal dalam peluncuran Program Keluarga Harapan secara Nasional, meskipun pada saat itu masih diluncurkan di 7 Provinsi yaitu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara dengan mengambil contoh disebanyak 48 Kabupaten/Kota dengan sasaran sebanyak 238.234 Rumah Tangga Sasaran Miskin (RTSM).

Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan untuk mensejahterakan rakyat kemudian melahirkan Peraturan Presiden NO. 15

Tahun 2010 dan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, TNP2K merupakan lembaga dibawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara langsung.

Program Keluarga Harapan dikenal sebagai kebijakan solutif yang diberikan pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tujuan jangka panjang dari dikeluarkannya Program Keluarga Harapan adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari rantai kemiskinan, sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah meburangi beban Keluarga Sangat Miskin (KSM). Program keluarga harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), dengan kewajiban memeriksakan kesehatan rutin anak balita dan ibu hamil atau menyusui, serta menyekolahkan.

Tujuan dikeluarkannya Program Keluarga Harapan ini berfokus untuk memutus rantai kemiskinan bagi generasi-generasi berikutnya dan juga memperbaiki taraf hidup masyarakat secara esensial menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Mangutip apa yang dikatakan Midgyle, bahwasannya *“kesejahteraan sosial merupakan a condition or state of human will being”* Masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan selain diberikan bantuan langsung bersyarat, para pendamping PKH juga memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan PKH agar terlepas dari rantai kemiskinan, sehingga PKH merupakan bantuan yang juga mendidik masyarakat agar tidak selalu mengharapkan uluran tangan dari pemerintah.

Kota batu merupakan lokasi yang dijadikan obyek dalam penulisan ini. Dengan adanya Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin Kota Batu untuk ikut berperan dalam Program Keluarga Harapan yang nantinya akan memberikan dampak logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Kota Batu yang juga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Dapat disadari bahwasanya Program Keluarga Harapan ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penerima Bantuan PKH Tahun 2018-2020

Kecamatan	Tahun		
	2018	2019	2020
Batu	2.190	1619	1366
Junrejo	1.096	844	870
Bumiaji	2.363	1857	1662
Total	5.649	4.320	3898

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya kecamatan Junrejo masih mengalami peningkatan jumlah penerima bantuan PKH. Hal itu dikarenakan masyarakat di Kecamatan Junrejo sebagian besar sebagai buruh sebanyak 23.56 %. Sedangkan masyarakat yang belum bekerja sebanyak 19.74 %. Selanjutnya masyarakat yang mencukupi kebutuhannya berdasarkan hasil pertanian adalah sebanyak 19.29 %. Kemudian penduduk yang memilih pedangang sebagai mata pencahariannya sebagai pedagang adalah sebanyak 9.60 %. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Junrejo masih mengalami peningkatan jumlah penerima PKH. Dinas Sosial Kota Batu menambah 100 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu: pertama, proses verifikasi yang sepenuhnya belum dilaksanakan, masyarakat memprotes data penerima tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu pihak puskesmas dan sekolah merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara berkelanjutan. Kedua, pembayaran kepada KSM tidak tepat waktu karena terkendala lambatnya proses verifikasi. Ketiga, kurangnya koordinasi yang baik dari instansi pendukung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan tidak semua KSM menerima jaminan kesehatan dan untuk orang miskin dan untuk bantuan pendidikan untuk siswa miskin.

Terlepas dari masalah itu penerima bantuan PKH di Kota Batu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menurut koordinator PKH Kota Batu yang ia miliki berjumlah 2176 penerima. Seperti yang diketahui jumlah penerima semakin bertambah tetapi hasil masih menjadi tanda tanya. Semakin besar cakupan dan jumlah penerima maka semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Yang masih menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa PKH yang sudah dimulai sejak 7 tahun yang lalu di Kota Batu masih saja memiliki permasalahan disetiap tahunnya. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi dengan proses pelaksanaannya, dan bagaimana strategi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. oleh karena masalah-masalah tersebut kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan*

Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana strategi Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kota Batu?”

Kajian Pustaka

Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan generasi-generasi sehingga generasi penerus dapat keluar dari rantai kemiskinan. Melalui program ini Keluarga Miskin (KM) didorong untuk memiliki akses dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi, pendampingan dan perawatan, termasuk juga akses pada berbagai program perlindungan sosial lainnya. Program Keluarga Harapan ini merupakan program pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan juga dengan melaksanakan kewajibannya. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.

Pengertian strategi

Strategi adalah hal yang sangat penting digunakan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan dan juga pencapaian untuk sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Menurut David (2011:18-19) strategi adalah sasaran bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan sumber daya dan keputusan puncak dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus-menerus sesuai keputusan yang telah disepakati bersama. Perencanaan induk yang komperhensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Rangkuti (2013:183).

Pengertian implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan juga tidak kurang. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, ada dua langkah yang ada. Yang pertama, yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Budi Winarno (2008:146) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar maupun perubahan kecil yang ditetapkan oleh beberapa keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang memiliki nilai dan arti yang subjektif, sehingga setiap individu memiliki pedoman tersendiri dalam menentukan faktor kesejahteraannya. Setiap keluarga dan individu memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam konteks bermasyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menjelaskan bahwasannya kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut memungkinkan seluruh kebutuhan rohani dan jasmani rumah tangga tersebut dapat tercukupi sesuai dengan indikator kebutuhan tingkat hidupnya.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”

Individu atau rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih kecil dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan yang bukan pokok, begitu juga sebaliknya apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, maka individu atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan belum sejahtera atau tergolong masih dalam klasifikasi rendah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono 2014:26 adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat dimana peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan berdasarkan fenomena dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Batu Jl. Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Teknik Pengukuran

Untuk dapat menjelaskan gambaran analisis strategi implementasi kebijakan keluarga harapan pada Kecamatan Junrejo Kota Batu, penulis menggunakan teknik pengukuran Skala Likert yaitu dengan memberikan nilai skor atas setiap alternatif tanggapan responden dari sejumlah item pertanyaan yang diajukan. Adapun kategori pengukuran terhadap variabel diklasifikasikan menjadi 3 bagian kategori yaitu: Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Untuk pilihan jawaban Baik diberi skor 3, pilihan jawaban Cukup Baik diberi skor 2, dan Kurang Baik diberi skor 1. Berdasarkan variabel yang memiliki 4 indikator yaitu: sosialisasi, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan.

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total skor nilai tertinggi} - \text{Total nilai skor terendah}}{\text{Jumlah kategori}} - 1$$

Populasi dan Sampel

Menurut Sumarni dan Wahyuni (2007:69), populasi merupakan keseluruhan obyek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu baik yang terbatas (*finite*) maupun tidak terbatas (*infinite*). Jumlah seluruh masyarakat kota batu yang masuk dalam daftar masyarakat miskin berdasarkan data Dinas Sosial Kota Batu berasal dari Balai Data Terpadu Tahun 2020 yang database-nya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berjumlah 3898 kepala keluarga. Kota batu dipilih karena Kota Batu merupakan termasuk salah kota yang cukup kompetitif dalam rangka pembangunan terutama dalam pembangunan pariwisata dalam cakupan Jawa Timur.

Sehingga untuk mengukur apakah Program Keluarga Harapan ini efektif kemudian peneliti

mengambil sampel di Kota Batu yang terdiri atas 3 kecamatan 12 desa dan 3989 KPM.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Menurut Sugiyono (2001:57) teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen masyarakat Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 137). Adapun data yang termasuk dalam sumber data primer adalah hasil kuisioner yang diperoleh langsung dari responden.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti contoh lewat orang lain atau berupa dokumen. Sehingga sumber data ini bersifat penunjang atau pelengkap data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku atau literatur, jumlah keluarga sangat miskin Kota Batu penerima manfaat PKH yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Batu serta data-data yang diperoleh dari jurnal dan internet yang terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, kuisioner, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan maka penulis menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan suatu cara menganalisa data yang telah tersedia pada objek penelitian dan membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan Strategi Kebijakan Publik, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi dan analisis secara deskriptif dilengkapi dengan nilai skor yang dimasukkan untuk mendukung pembahasan masalah untuk mengambil keputusan dan kemudian memberikan saran atau alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pembahasan

Gambaran Umum Kota Batu

Kota batu terletak pada posisi 122°17'-122°57' Bujur Timur dan 7°44'-8°26' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42 % dari total luas Jawa Timur. Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah seluas 19.098,72 Ha tersebut, terbagi Kecamatan Batu seluas 2.565,02 Ha dan Kecamatan Bumiaji dengan luas wilayah 12.797,89 sedangkan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Junrejo.

Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial. Adapun peran Dinas Sosial dalam Implementasi Program Keluarga Harapan adalah :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pelayanan Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai merupakan syarat penting yang harus dipenuhi untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan kesehatan. Kehadiran tenaga kerja kesehatan yang kompeten tidak hanya diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan, akan tetapi mereka juga dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program PKH ini. Adapun pelayanan yang diberikan pihak Dinas Sosial dalam pelayanan Program Keluarga Harapan yaitu:

- a. Membimbing peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, seperti datang ke Puskesmas atau sarana kesehatan yang lainnya.
 - b. Melakukan verifikasi apakah peserta PKH telah memenuhi komitmen yang ditetapkan, seperti rutin memeriksakan kehamilan.
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada keluarga peserta penerima PKH, seperti kesempatan dan kemudahan dalam memeriksakan kesehatan peserta penerima PKH.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pelayanan Pendidikan

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, khususnya bagi anak dari RTSM, serta untuk

mngentaskan dan mengurangi angka pekerja anak. Adapun peran Dinas Sosial dalam pelayanan PKH dibidang pendidikan yaitu:

- a. Mendaftarkan peserta didik dan memenuhi jumlah kehadiran.
- b. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anak-anak peserta PKH di kelas.
- c. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Komponen kesejahteraan sosial dibagi menjadi 2 yaitu disabilitas berat dan lansia 60 ke atas. Berikut adalah penjelasan tentang pelayanan kepada kesejahteraan sosial:

- a. Disabilitas berat
 1. Layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat)
 2. Layanan home care (pengurus memandikan, mengurus, dan merawat KPM PKH)
- b. Lansia 60 tahun ke atas
 1. Memastikan pemeriksaan kesehatan
 2. Penggunaan layanan puskesmas santun lanjut usia
 3. Layanan home care (pengurus merawat, memandikan dan mengurus KPM lanjut usia)
 4. Day care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan penulis pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Program Keluarga Harapan pada masyarakat Kota Batu dan juga Strategi seperti apa yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Junrejo Kota Batu, maka penulis akan memaparkan data identitas responden. Identitas tersebut antara lain, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Tujuan pemaparan data identitas responden ini untuk penunjang pembahasan tentang proses implementasi. Subyek pada penelitian ini adalah Dinas Sosial, pendamping PKH, dan beberapa warga masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Strategi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu Pada Kecamatan Junrejo Kota Batu

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah memberikan pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat mengenai cara memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan komunikasi sosial terhadap masyarakat dalam memberikan pengarahan, pedoman, dan telaah untuk kepaahaman masyarakat dalam tata cara mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah dan untuk mengetahui apakah sosialisasi yang diterapkan pada Strategi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Junrejo. Penilaian komunikasi sosial dan kepaahaman masyarakat menunjukkan bahwa dari 120 responden yang merupakan masyarakat Kota Batu memperoleh skor 2.458 tanggapan responden berada pada kategori cukup baik.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan adalah pemerintah telah menempatkan instrumen yang tepat untuk melaksanakan kebijakan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan pendamping PKH telah melaksanakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam menetapkan sasaran dan melaksanakan kebijakan. Dari 210 responden yang merupakan warga masyarakat Kecamatan Junrejo Kota Batu memperoleh skor 2.508 tanggapan responden berada pada kategori cukup baik.

3. Tepat Target

Tepat target merupakan salah satu hal yang terpenting dalam strategi Dinas Sosial dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan target kan tepat apabila sesuai dengan kebijakan dan yang dijadikan target telah memiliki kesiapan baik dari penggunaan dan manfaat bantuan dari pemerintah. Dalam strategi implemntasi kebijakan Program Keluarga Harapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden no. 15 Tahun 2010 dan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Sesuai dengan kebijakan dan kesiapan penerima menunjukkan bahwa dari 210 responden yang merupakan warga Kecamatan Junrejo Kota Batu memperoleh total skor 2537 tanggapan responden berada pada kategori cukup baik.

4. Tepat Lingkungan

Dalam strategi Dinas Sosial dalam mengimplementasikan kebijakan tepat lingkungan merupakan salah satu penentu keberhasilan implementasi, karena jika masyarakat mendukung maka resistensi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diatasi di samping itu pelaksanaan harus mengetahui bagaimana persepsi

masyarakat terhadap kebijakan agar masyarakat memperoleh kenyamanan dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan. Adapun yang menjadi item penilaian pada indikator tepat lingkungan ini adalah dukungan masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan.

Pada indikator tepat lingkungan dengan item penilaian yaitu dukungan masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan menunjukkan bahwa dari 210 responden yang merupakan warga Kecamatan Junrejo Kota Batu berada pada skor 2.483 tanggapan responden pada kategori cukup baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya strategi Dinas Sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu memiliki nilai yang signifikan yakni dalam kategori baik yakni dengan skor 9986. Akan tetapi nilai signifikan sebesar 9986 tersebut juga masih memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Meskipun tanggapan responden secara umum meanyatakan bahwasannya pelaksanaanya menyatakan sudah cukup bagus namun masih terdapat beberapa masalah yang cukup krusial yakni terkait dengan lambatnya proses pencairan bantuan uang tunai, sosialisasi yang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, pemberdayaan bantuan program kewirausahaan yang kurang dioptimalkan, serta masyarakat yang juga masih menggunakan bantuan uang tunai mereka untuk kebutuhan pokok mereka bukan untuk pembukaan lapangan usaha yang bisa mereka kelola secara mandiri.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis data, penulis berkenan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Batu:

- Perlunya dilakukan peningkatan kualitas dari sumber daya ,anusia sendiri pada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pada peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan , penarahan serta pelatihan kepada KPM, tentang penggunaan dana yang efektif. Hal itu bertujuan agar para KPM bisa membuka usaha sesuai dengan kemampuan mereka.
- Perlunya peningkatan sosialisasi oleh Pendamping PKH dan Dinas Sosial. Setidaknya satu minggu sekali secara rutin. Hal ini bertujuan agar KPM lebih paham dalam mengelola dana yang diberikan oleh

pemerintah dengan sebaik mungkin dan dapat lebih mengerti terhadap tugas dan kewajibannya. Agar dana yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah.

- c. Peningkatan monitoring yang perlu juga ditingkatkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Batu. Karena pada pelaksanaan monitoring ini bertujuan sampai dimana perkembangan PKH yang ada di Kota Batu.

Daftar Pustaka

- Hutahulung, Simon. 2012. *Pemimpin, Birokrasi dan Kebijakan*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2002, hal 127.
- Muhid, Abdul. 2012. *Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (23 ed.). Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumadi, Dilla. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007, hal 144.
- Umar, S., & Miftachul, C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. Yogyakarta: Bappeda DIY.
- BPPN. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Dampak Terhadap Penyediaan Pelayanan Kesehatan)*. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah.
- Delfira (2015). *Presepsi Pegawai Pengambilan Keputusan Oleh Atasan Langsung Di Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X (Sumatra Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau)*. Jurnal: Administrasi Pendidikan.
- Rizal, Muhammad 2017. *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017*.
- Sabarisman, M. (2015). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi*. Sukabumi: Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
- Widyastuti, Astiana 2010. *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*.
- Impres No.3 Tahun 2011 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K.
- Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Permensos No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin.